



**BPKPAD KAB
TEMANGGUNG**

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI**RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP,M.M.
NIP. 198311182002122001

PETUGAS VERIFIKATOR



HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
NIP. 199607072022022001

Mengetahui

KERALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan Rencana Kerja ini disusun berdasar dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juli 2024


 KEPALA BPKPAD
 KABUPATEN TEMANGGUNG,
TRI WINARNO, SE.MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2023.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKPAD Tahun 2024-2026	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPAD	28
2.3. Data Pokok.....	34
2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD	62
2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD	64
2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	73
2.7. Inovasi Perangkat Daerah.....	73
2.8. Penghargaan	74
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	75
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	75
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	79
4.1. Program dan Kegiatan	79
BAB V PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD TAHUN 2023.....	12
Tabel 2. 2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	20
Tabel 2. 3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Triwulan I Tahun 2024	29
Tabel 2. 4	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 (LRA Per 31 Maret 2024).....	34
Tabel 2. 5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	35
Tabel 2. 6	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2023.....	35
Tabel 2. 7	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 ...	36
Tabel 2. 8	Indeks Dimensi Pengakolasian Anggaran Belanja Dalam APBD	37
Tabel 2. 9	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	38
Tabel 2. 10	Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2024.....	39
Tabel 2. 11	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	40
Tabel 2. 12	Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d 2024.....	40
Tabel 2. 13	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2018-2023	41
Tabel 2. 14	Penerbitan SP2D Tahun 2024	42
Tabel 2. 15	Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada tahun 2024 Triwulan I	45
Tabel 2. 16	Cakupan Rekonsiliasi <i>Data</i> Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2024	47
Tabel 2. 17	Rincian jumlah BA yang dibuat pada Triwulan I Tahun 2024	47
Tabel 2. 18	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu	48
Tabel 2. 19	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu	48
Tabel 2. 20	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja tahun 2019-2024	49
Tabel 2. 21	Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel TA 2024 triwulan I.....	49
Tabel 2. 22	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2019-2024.	53
Tabel 2. 23	Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2024.....	54
Tabel 2. 24	54

Tabel 2. 25	Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2023-2024 Triwulan I.....	55
Tabel 2. 26	Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	57
Tabel 2. 27	Persentase Realisasi terhadap target Pajak Daerah tahun.....	58
Tabel 2. 28	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 (Data Per 31 Maret 2024).....	59
Tabel 2. 29	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu.....	60
Tabel 2. 30	Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2024.....	61
Tabel 2. 31	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat	62
Tabel 2. 32	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	65
Tabel 2. 33	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat	73
Tabel 2. 34	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023.....	73
Tabel 2. 35	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	74
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	76
Tabel 4. 1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung tahun 2025	80
Tabel 4. 2	Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

Gambar 2.1 Cek List Kelengkapan Dokumen SPM LS untuk Barang/Jasa/
modal/BTL Non Belanja Pegawai 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

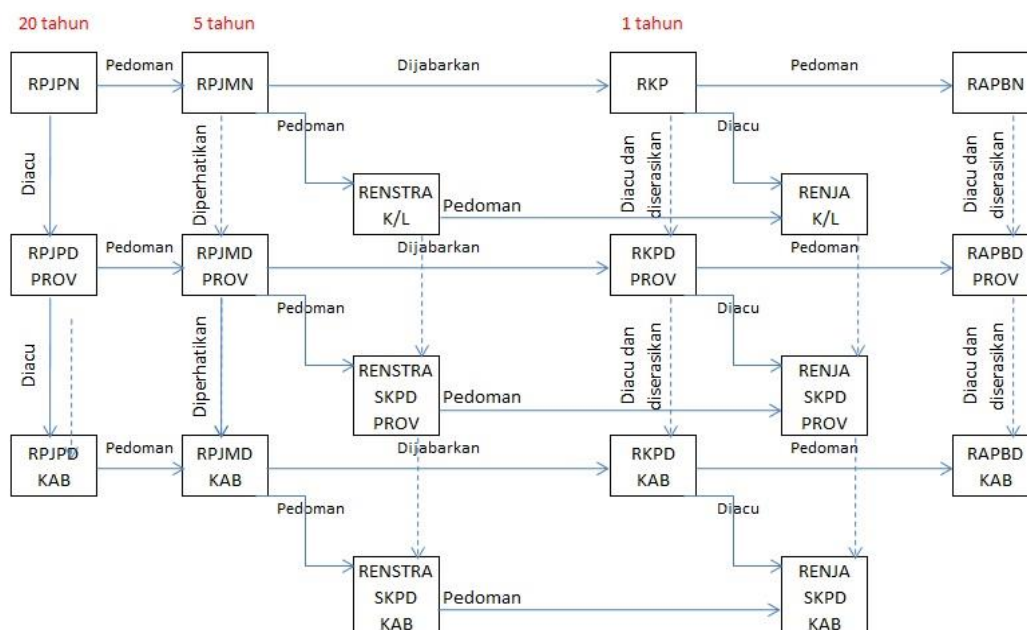
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja)

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang menyangkut aspek:

1. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
2. Kondisi pelayanan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ;
4. Data Pokok Pembangunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
6. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan

7. Informasi lain terkait pelayanan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan Dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

g. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan Kegiatan Prioritas Dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun
2018-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024 terhadap target di tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ke- pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2018-2023. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD TAHUN 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah				9.522.314.450	96,84	2.377.907.200	1.642.649.700		1.216.721.712		
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100		100			100		100	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96		89,96			100		100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		100			100		100	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		100			100		100	
		Persentase realisasi keuangan	%	93		93			94,70		100	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90		90			100		100	
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP		WTP			WTP		100	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.510.725.700		676.726.800	504.376.800		405.130.894		80,32
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS APBD, KUPA & PPAS Perubahan APBD	Dokumen	57	391.057.400	2	77.000.000	52.345.000	2	42.828.720	100	81,82
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	58	165.064.300	2	60.000.000	37.805.000	2	11.903.000	100	31,49
5.02.02.2.01.07	Koordinasi & Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD	Terlaksananya penelitian RKA, RKPA dan terlaksananya Verifikasi DPA dan DPPA	Dokumen	2329	720.788.800	2	282.726.800	245.726.800	2	215.069.504	100	87,52

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung & Perbup tentang Penjabaran APBD	Dokumen	30	595.657.700	2	227.000.000	168.500.000	2	135.329.670	100	80,31
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	Paket	4	1.638.157.500	1	30.000.000	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan											100	
Predikat											Sangat Tinggi	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.693.930.600		556.180.400	467.180.400		337.261.518		72,19
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	Dokumen	37400	1.333.459.000	12	495.180.400	467.180.400	12	337.261.518	100	72,19
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Dokumen	520	239.756.600	104	50.000.000	-	-	-	-	-
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data iuran wajib pegawai	Dokumen	40	120.715.000	104	11.000.000	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan											100,00	
Predikat											Sangat Tinggi	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				4.317.658.150		1.145.000.000	671.092.500		474.329.300		70,68
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah sesuai SAP	Dokumen	520	132.269.100	104	41.000.000	-	-	-	-	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Dokumen	35	353.108.250	1	61.000.000	-	-	-	-	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	10	471.157.300	1	143.000.000	210.616.500	1	192.794.800	100	91,54
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, asistensi dan monitoring penyusunan laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	unit kerja	103	3.361.123.500	104	900.000.000	460.476.000	104	281.534.500	100	61,14
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00
										Predikat	Sangat Tinggi	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				8.729.470.650		1.291.180.400	1.487.890.400		1.289.177.077,00		86,64
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1		88,1			100	-	100	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1		99,1			94,33	-	95,19	
502.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				8.729.470.650	90,62	1.291.180.400	1.487.890.400		1.289.177.077		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Satuan Kerja	103	142.292.000	103	31.000.000	25.500.000	103	24.479.050	100	96,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Unit Kerja	578	2.583.400.650	578	835.000.000	1.352.390.400	578	1.208.900.415	100	89,39
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	720	4.328.367.500	12	51.453.600	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa tanah dan/atau gedung serta pinjam pakai	Tanga/Bangunan	103	448.169.000	103	165.000.000	110.000.000	103	55.797.612	100	50,73
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	Satuan Kerja	103	1.227.241.500	103	208.726.800	-	-	-	-	-
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00	
									Predikat		Sangat Tinggi	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.548.256.700		991.814.400	657.420.400		543.977.599		82,74
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27		1,27			0,85	-	67,12	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100		100			100	-	100	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95		95			101,4 7	-	100	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95		95			100	-	100	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.548.256.700		991.814.400	657.420.400		543.977.599		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan, pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	OP/WP	5000	1.987.610.300	600	602.907.200	326.718.200	1.802	262.941.328	100	80,48
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan pemutakhiran data wajib pajak dan objek Pajak Daerah	bulan	60	1.287.652.600	12	327.180.400	257.180.400	12	213.640.667	100	83,07
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	60	105.023.500	12	16.000.000	17.795.000	12	17.525.500	100	98,49
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	60	167.970.300	12	45.726.800	55.726.800	12	49.870.104	100	89,49
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00	
									Predikat		Sangat Tinggi	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.404.732.159		16.424.779.459	18.041.005.915		17.400.095.858		96,45
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan						15.270.589.459	16.981.805.915		16.560.686.915		42,55
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60		14	15.270.589.459	16.981.805.915	14	16.560.686.915	100	97,52

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian						25.690.000	13.250.000		13.250.000		
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit			8	25.690.000	13.250.000	8	13.250.000	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				520.149.375		186.500.000	186.500.000		107.172.899		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	60	39.999.375	12	10.000.000	10.000.000	12	9.925.249	100	99,25
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	60	100.897.700	12	35.000.000	35.000.000	12	26.428.690	100	75,51
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	39.763.400	12	13.500.000	13.500.000	12	10.830.100	100	80,22
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	60	177.614.900	12	78.000.000	78.000.000	12	10.473.850	100	13,43
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	60	158.874.000	12	50.000.000	50.000.000	12	49.515.010	100	99,03
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-		-		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit			2		-	-	-	-	-
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit			3		-	-	-	-	-
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100,00		
									Predikat	Sangat Tinggi		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.940.137.699	90,62	622.000.000	622.000.000		580.998.004,00		93,41
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	7.995.000	12	2.000.000	2.000.000	12	-	100	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	Bulan	60	690.000.000	12	230.000.000	230.000.000	12	213.848.830	100	92,98
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	1.242.142.699	12	390.000.000	390.000.000	12	367.149.174	100	94,14
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan										100,00		
Predikat										Sangat Tinggi		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				684.480.785	90,62	320.000.000	237.450.000		137.988.040		58,11
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	60	270.835.380	12	85.000.000	85.000.000	12	65.262.740	100	76,78
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	60	149.833.720	12	160.000.000	70.000.000	12	26.919.100	100	38,46
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	60	93.788.120	12	25.000.000	36.500.000	12	19.602.700	100	53,71

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	60	170.023.565	12	50.000.000	45.950.000	12	26.203.500	100	57,03
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan											100,00	
Predikat											Sangat Tinggi	
JUMLAH							21.085.681.459	21.828.966.415		20.449.972.246		
											100	93,68
										PREDIKAT	Sangat Tinggi	
											97,31	
										PREDIKAT	Upaya Keras	

Tabel 2. 2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Triwulan I tahun 2024

NO	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN							I					
	KEGIATAN								K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Program pengelolaan keuangan daerah				2.148.000.000		1.994.849.700	1.561.941.000		63.489.616		63.489.616		3,18
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100		100			100		100		100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		100			100		100		100	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		100			100		100		100	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	%	100		100			100		100		100	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100		100			100		100		100	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				707.500.000		554.350.000	521.350.000		10.722.055		10.722.055		1,93
a	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok	6	71.500.000,00	2	57.600.000	57.600.000	0	831.000	-	831.000	-	1,44
b	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok	6	83.500.000,00	2	41.750.000	41.750.000	0	714.000	-	714.000	-	1,71
c	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	6	285.000.000	2	235.000.000	216.000.000	2	6.284.055	2	6.284.055	100	2,67
d	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	6	267.500.000	2	220.000.000	206.000.000	0	2.893.000	-	2.893.000	-	1,32

NO	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN							I					
	KEGIATAN								K	Rp				
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		25	
												Predikat		Sangat Tinggi
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				625.000.000		764.999.700	382.216.000		29.389.915		29.389.915		3,84
a	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dok	103	625.000.000	103	764.999.700	382.216.000	103	29.389.915	103	29.389.915	100	3,84
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100
												Predikat		Sangat Tinggi
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				815.500.000		675.500.000	658.375.000		23.377.646		23.377.646		3,46
a	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	6	280.500.000	2	235.000.000	235.000.000	2	15.809.500	2	15.809.500	100	6,73
b	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, asistensi dan monitoring penyusunan laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	Orang	1236	535.000.000	1236	440.500.000	423.375.000	309	7.568.146	309	7.568.146	25	1,72
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		62,50
												Predikat		Sangat Tinggi
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.227.329.859		1.215.148.000	1.100.551.400		34.746.415		34.746.415,00		3,16
		Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100		100			100		100		100	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	85		80			97,10		97,10		100	

NO	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024					
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN							I									
	KEGIATAN								K	Rp					K	Rp	K	Rp
															Predikat	Sangat TRendah		
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				26.093.787.109		25.834.793.306	23.402.299.986		3.587.213.242		3.587.213.242					15,33	
1	Administrasi Keuangan				24.888.287.109		24.812.793.306	22.380.299.986		3.420.084.245		3.420.084.245					15,28	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Blh	8036	24.888.287.109	8.036	24.812.793.306	22.380.299.986	8036	3.420.084.245	8.036	3.420.084.245	100	13,78				
															Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100	
																	Predikat	Sangat Tinggi
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.500.000		190.000.000	190.000.000		13.499.500		13.499.500						7,11
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	13.000.000	12	10.000.000	10.000.000	3	201.000	3	201.000	25	2,01				
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	40.000.000	12	35.000.000	35.000.000	3	342.800	3	342.800	25	0,98				
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	17.000.000	12	15.000.000	15.000.000	3	638.000	3	638.000	25	4,25				
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	90.000.000	12	80.000.000	80.000.000	3	2.804.200	3	2.804.200	25	3,51				
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	57.500.000	12	50.000.000	50.000.000	3	9.513.500	3	9.513.500	25	19,03				
															Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		25,00	
																	Predikat	Sangat Rendah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				752.500.000		622.000.000	622.000.000		142.560.307		142.560.307,00						22,92
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	2.500.000	12	2.000.000	2.000.000	3	0	3	-	25	-				
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	278.000.000	12	230.000.000	230.000.000	3	53.814.455	3	53.814.455	25	23,40				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
 - b. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
 - c. Persentase dokumen penganggaran tepat waktu
 - d. Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu
 - e. Persentase realisasi keuangan
 - f. Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel
 - g. Opini BPK atas LKPD
 - h. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja
 - i. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
 - j. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
 - k. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
 - l. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - e. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - f. Penyusunan Standar Harga
 - g. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- i. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - j. Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - k. Penagihan Pajak Daerah
 - l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

–

4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:

- a. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja.

Indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja dengan status “Tidak Tercapai” dengan capaian kinerja sebesar 95,19% dari target RPJMD sebesar 99,1%. Meskipun berpredikat Tidak Tercapai, terjadi peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2023 (94,33%) dibandingkan dengan tahun 2022 (88,21%). Status Tidak Tercapai pada tahun 2023 disebabkan karena beberapa aset belum termanfaatkan karena tarif berdasarkan nilai appraisal terlalu tinggi; penyewa sudah tidak mampu lagi membayar terhadap harga yang ditentukan dan kelompok tani yang menyewa lahan berhenti menyewa. Faktor pendorong meningkatnya kinerja di tahun 2023 komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan. Adapun strategi yang dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya evaluasi atas nilai *appraisal* yang telah berjalan dan sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya kepada masyarakat

- b. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak

Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak pada tahun 2023 berpredikat "Tidak Tercapai" dengan capaian kinerja 67,12%. Pada tahun 2023, Realisasi kinerjanya adalah 0,85% turun dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 1,94. Secara umum faktor ketidak tercapainya indikator ini adalah sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 (SISMIOP) serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Sedangkan faktor pendorong dalam ketercapaian indikator ini adalah melaksanakan pendataan obyek

baru salah satunya dengan metode survey lapangan dan atas kesadaran wajib pajak sendiri untuk mendaftarkan obyeknya sehingga strategi yang digunakan adalah peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru.

5. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

-
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **95,06**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Capaian Kinerja : 92,82% Kategori Baik

Berdasarkan Tabel 2.2 Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Dari evaluasi Kinerja triwulan I ini pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Triwulan I Tahun 2024(Laporan IKPD)
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi s.d tw I taun 2024	Capaian s.d tw I 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	15,5	15,75	16	18,53	100,00	ST				
2	Opini BPK atas LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100,00	ST				
3	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	91	93	95	100	100,00	ST				
4	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	ST				
5	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	ST				
6	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	n.a	100	100	100	100	100,00	ST				
7	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	n.a	100	100	100	100	100,00	ST				
8	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	n.a	100	100	100	100	100,00	ST				
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	80	80	85	97,1	100,00	ST				
10	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	n.a	8	9	10	2,09	26,07					SR
11	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	ST				
12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	n.a	95	95,5	96	14,39	15,15					SR
13	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	ST				

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan skala nilai peringkat kinerja “Sangat Tinggi” terdiri dari :
 - a. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
 - 1) Faktor Pendorong : Ketersediaan Anggaran yang berasal dari berbagai sumber
 - 2) Faktor Penghambat : pengalokasian belanja infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan daerah:
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
 - 1) Faktor Pendorong : Sudah terjadwalnya tahapan penyusunan yang terinci sesuai ketentuan Kemendagri
 - 2) Faktor Penghambat : Keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
 - c. Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu
 - 1) Faktor Pendorong : Kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM
 - 2) Faktor Penghambat : SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPKPAD
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : peningkatan koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.
 - d. Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 1) Faktor Pendorong : Kecepatan tindak lanjut SKPD dalam pembuatan Rekonsiliasi
 - 2) Faktor Penghambat : SKPD Masih terdapat selisih terhadap hasil rekonsiliasi
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Masih terdapat selisih terhadap hasil rekonsiliasidiproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

- e. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu
- 1) Faktor Pendorong : Adanya Target kinerja
 - 2) Faktor Penghambat : Faktor Sumber Daya Manusia, pada saat penyusunan LKPD, belum semua Perangkat Daerah menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu, sehingga menjadi penghambat dalam proses Penyusunan LKPD.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Pemda mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja sehingga penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dalam rangka penyusunan LKPD tepat waktu.
- f. Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu
- 1) Faktor Pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah
 - 2) Faktor Penghambat : SDM SKPD, tidak adanya *knowledge transfer* antar pengurus barang yang lama dengan pengurus barang baru/pengganti.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Menjalin koordinasi yang baik dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah lebih intensif dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
- g. Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
- 1) Faktor Pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah
 - 2) Faktor Penghambat : Beberapa aset belum termanfaatkan karena tarif berdasarkan nilai appraisal terlalu tinggi, Penyewa sudah tidak mampu lagi membayar terhadap harga yang ditentukan, kelompok tani yang menyewa lahan berhenti menyewa
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Evaluasi atas nilai appraisal yang telah berjalan, Sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya Kepada Masyarakat
- h. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
- 1) Faktor Pendorong : Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode

survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri

- 2) Faktor Penghambat : Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan
- i. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
- 1) Faktor Pendorong : Tersedianya sistem aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame dan air tanah, dan meningkatnya kesadaran WP badan (vendor) reklame.
 - 2) Faktor Penghambat : Masih ditemukan perbedaan antara izin yang diterbitkan oleh DPM dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.
- j. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
- 1) Faktor Pendorong : Bertambahnya wajib pajak melalui kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun melakukan update data atas ketetapan pajak tahun sebelumnya sehingga meningkatkan nominal pajak pada tahun 2024 ini dimana nantinya akan meningkatkan capaian realisasi penerimaan pajak daerah.
 - 2) Faktor Penghambat : Kondisi pada triwulan I belum menggambarkan keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan akan tercapai pada triwulan IV.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : rutin melakukan sosialisasi tentang pajak daerah menggunakan beberapa platform digital yang tersedia.
- k. Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

- 1) Faktor Pendorong : telah tersedianya bit.ly sebagai sarana rekonsiliasi setiap bulannya, sehingga proses rekonsiliasi dapat terlaksana di awal bulan berikutnya.
 - 2) Faktor Penghambat : terdapat beberapa SKPD yang sudah mengisi bit.ly tepat waktu namun mengumpulkan hardfile BA Rekonsiliasi lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : pemantauan pengisian bit.ly oleh SKPD pengampu pendapatan
2. Capaian Indikator dengan skala nilai peringkat kinerja “Sangat Rendah” terdiri dari:
- a. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
 - 1) Faktor Pendorong : Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri
 - 2) Faktor Penghambat : Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan
 - b. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
 - 1) Faktor Pendorong : Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri
 - 2) Faktor Penghambat : Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan

2.3. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 (satu) jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Program

a. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%. Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 (LRA Per 31 Maret 2024)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	278.306.408.650	307.456.823.576	363.956.011.433	308.726.486.721	351.823.679.260	64.825.767.126
Realisasi Pendapatan Daerah	1.840.953.306.303	1.830.815.032.558	1.950.113.739.891	1.849.550.699.127	2.005.427.452.487	349.835.100.990
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	15,12	16,79	18,66	16,69	17,54	18,53

Sumber: LRA Kab. Temanggung, 2023

Berdasarkan Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase perolehan realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 tercapai sebesar 18,53%.

Meskipun persentase tidak jauh berbeda dengan persentase tahun sebelumnya hal ini diakibatkan karena realisasi pendapatan asli daerah tidak jauh berbeda komposisi penerimaannya dengan realisasi pendapatan daerah, dimana pendapatan yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah belum banyak, sama halnya dengan pendapatan daerah yang sudah didapatkan juga masih belum banyak. Sehingga koefisien persentase perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah tidak terlihat mengkhawatirkan meskipun secara pendapatan yang diterima masih belum banyak, akan tetapi karena dua komponen tersebut masih sama-sama

menerima dengan jumlah yang sama sedikitnya sehingga jumlah persentasenya tidak terlalu tertinggal jauh dengan persentase tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Uraian	2024
Pendapatan Asli Daerah	64.825.767.126
I.A Hasil Pajak Daerah	11.012.235.301
I.B Hasil Retribusi Daerah	2.131.083.120
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.024.486.445
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	44.657.962.260

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2024

Tabel 2. 6
REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.825.767.126
PENDAPATAN TRANSFER	285.009.333.864
Jumlah Pendapatan	349.835.100.990

Sumber: LRA Kab Temanggung Per 5 Januari 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 nilai capaian realisasinya sudah merata antara pendapatan pajak, retribusi, maupun kekayaan daerah.

Faktor pendorong di indikator ini yakni mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD dan diharapkan di tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan.

b. Opini BPK atas LKPD

Opini Laporan Keuangan Pemerintah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem

pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

m

ber : BPKPAD Kab Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2019 sampai 2023) memperoleh opini WTP. Opini dari Laporan Keuangan Tahun 2024 masih menggunakan tahun 2023 dikarenakan tahun 2024 masih **dalam tahapan proses pemeriksaan** dari BPK RI yang diperkirakan selesai dan mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Mei Tahun 2024. Atas opini yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah

- Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan
- Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Upaya yang terus dilakukan :

- Melakukan monitoring laporan keuangan
- Melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

2. Indikator Kinerja Program

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

a. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

- Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.
- Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Tabel 2. 8
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	$\frac{1+1+1+1}{4}=1$	$=4/4*100=100$
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1		

Sumber data : Bidang Penganggaran, 2023

Adapun data Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 9
Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skor rata-rata tiap fungsi urusan	4	4	4	4	4	4
Pengalokasian anggaran	4	4	4	4	4	4
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar **Rp706.798.551.915,00** atau sebesar 33,67% dari total belanja daerah sebesar **Rp2.098.911.972.717,00**;
2. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar **Rp423.391.635.515,00** atau sebesar 28,08% dari total belanja daerah sebesar **Rp1.507.994.689.834,00** di luar belanja gaji ASN;
3. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar **Rp175.330.832.138,00** atau sebesar 26,98% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan belanja transfer ke desa atau sebesar **Rp649.944.088.000,00**;
4. Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar **Rp60.604.325.920,00** atau sebesar 2,89% dari total belanja daerah sebesar **Rp2.098.911.972.717,00**.

Dari keempat poin di atas telah memenuhi minimal dari indikator berdasar tabel 1.5, sehingga skor rata-rata tiap fungsi urusan tahun 2024 sebesar 4 dengan predikat telah tercapai ketersediaan anggaran dari berbagai sumber.

b. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyebutkan secara jelas Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	WAKTU
1	Penyampaian rancangan KUA PPAS 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II Bulan Juli 2023 (14 Juli 2023)
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Bulan Agustus 2023 (14 Agustus 2023)
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus 2023 (22 Agustus 2023)
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu III bulan September 2023 (21 September 2023)
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 November 2023 (satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan) (30 November 2023)
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan Bersama (5 Desember 2023)
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling akhir 31 Desember 2023 (28 Desember 2023)

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 11
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	4	6	7	3	7	7
Total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	57,14	85,71	100	42,86	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran (tahapan penyusunan APBD TA 2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua dokumen penganggaran untuk penetapan Tahun Anggaran 2024 disusun pada Tahun 2023 dan dapat dilaporkan bahwa semua dokumen dimaksud telah disusun dengan persentase dokumen penganggaran tepat waktu yaitu sebesar 100% atau predikat telah tercapai.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah telah terjadwalnya tahapan penyusunan yang terinci sesuai ketentuan Kemendagri. Sedangkan factor penghambatnya adalah pengalokasian belanja infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan daerah. Secara lengkap dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud terinci pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2. 12
Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d 2024

No	Dokumen Penganggaran	TAHUN						%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	V	V	V	X	V	V	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	X	V	V	X	V	V	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	X	V	V	X	V	V	
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	X	X	V	X	V	V	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	V	V	V	V	V	V	
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	V	V	V	V	V	V	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	V	V	V	V	V	V	

Sumber Data : Bidang Penganggaran tahun 2023

Keterangan : V = Tepat waktu
 X = Tidak tepat waktu
 Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

c. Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber : Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Temanggung).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung di awal Desember 2021 telah menggunakan aplikasi SP2D *online*. Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
 Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2018-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	7.735	8.566	8.757	9.411	8.837	1.437
Total SP2D yang diterbitkan (%)	7.735	8.566	8.757	9.411	8.837	1.437
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: BPKPAD 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Faktor pendorong indikator ini adalah kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM, Faktor penghambat yang mungkin terjadi salah satunya adalah SKPD kurang

responsif terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan, adanya sikap pasif dalam memenuhi kelengkapan berkas, dan kurangnya koordinasi antarpihak yang terkait. Upaya yang terus dilakukan adalah peningkatan koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14
Penerbitan SP2D Tahun 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	16
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23	23
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	26
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	54	54
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	43	43
6	Bagian Hukum	5	5
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	9	9
8	Bagian Organisasi	3	3
9	Bagian Pembangunan	6	6
10	Bagian Pemerintahan	5	5
11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	9
12	Bagian Perekonomian	8	8
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15	15
14	Bagian Umum	55	55
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15	15
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	16
17	Dinas Kesehatan	30	30
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	24	24
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	58	58
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	30	30
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33	33
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	15
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28	28
24	Dinas Penanaman Modal	33	33

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	65	65
26	Dinas Perhubungan	47	47
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	19	19
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20	20
29	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	64	64
30	Dinas Sosial	25	25
31	Inspektorat	19	19
32	Kecamatan Bansari	18	18
33	Kecamatan Bejen	16	16
34	Kecamatan Bulu	18	18
35	Kecamatan Candirot	13	13
36	Kecamatan Gemawang	17	17
37	Kecamatan Jumo	17	17
38	Kecamatan Kaloran	18	18
39	Kecamatan Kandangan	17	17
40	Kecamatan Kedu	22	22
41	Kecamatan Kledung	20	20
42	Kecamatan Kranggan	20	20
43	Kecamatan Ngadirejo	15	15
44	Kecamatan Parakan	16	16
45	Kecamatan Pringsurat	16	16
46	Kecamatan Selopampang	16	16
47	Kecamatan Temanggung	16	16
48	Kecamatan Tembarak	17	17
49	Kecamatan Tlogomulyo	16	16
50	Kecamatan Tretep	17	17
51	Kecamatan Wonobojo	13	13
52	Kelurahan Banyuurip	8	8
53	Kelurahan Butuh	9	9
54	Kelurahan Giyanti	9	9
55	Kelurahan Jampirejo	9	9
56	Kelurahan Jampiroso	9	9
57	Kelurahan Jurang	9	9
58	Kelurahan Kebonsari	9	9

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
59	Kelurahan Kertosari	9	9
60	Kelurahan Kowangan	10	10
61	Kelurahan Kranggan	9	9
62	Kelurahan Madureso	9	9
63	Kelurahan Manding	9	9
64	Kelurahan Manggong	8	8
65	Kelurahan Mungseng	9	9
66	Kelurahan Parakan Kauman	9	9
67	Kelurahan Parakan Wetan	8	8
68	Kelurahan Purworejo	9	9
69	Kelurahan Sidorejo	9	9
70	Kelurahan Temanggung I	9	9
71	Kelurahan Temanggung II	9	9
72	Kelurahan Tlogorejo	8	8
73	Kelurahan Walitelon Selatan	9	9
74	Kelurahan Walitelon Utara	8	8
75	Rumah Sakit Umum Daerah	10	10
76	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	29	29
77	Sekretariat DPRD	39	39
	JUMLAH	1.437	1.437

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.14, dapat diketahui bahwa terdapat 77 SKPD dengan pengajuan SPM sebanyak 1.437 dan menerbitkan SP2D sebanyak 1.437. Jadi, dari SPM yang diajukan, semuanya terbit SP2D.

Dalam proses pengajuan dan verifikasi berkas Surat Perintah Membayar (SPM) didasarkan pada cek list kelengkapan dokumen SPP-SPM yang sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Temanggung. Jika dalam pengajuan permohonan pembayaran terdapat berkas SPM yang tidak memenuhi syarat cek list sebagaimana yang telah tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Temanggung, maka berkas

pengajuan dikembalikan ke SKPD untuk dilengkapi dan dilakukan perbaikan.

Gambar 2. 1
Cek List Kelengkapan Dokumen SPM LS untuk Barang/Jasa/modal/BTL Non Belanja Pegawai

CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL NON BELANJA PEGAWAI			
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	BILLING PAJAK TANDA TANGAN BENDAHARA DAN STEMPER PD		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO REK BANK PIHAK KETIGA/FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMATERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	JAMINAN PEMELIHARAAN		
12.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
13.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
14.	INVOICE		
15.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
16.	SPTJ PENYEDIA		
17.	SPTJ PPTK		
18.	SPTJ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
19.	SPTJ PA		
20.	NPHD		
21.	SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK PD		

PPK PD

Nana Terang
NIP.

Tabel 2. 15
Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada tahun 2024 Triwulan I

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	Januari	405	405
2	Pebruari	429	429
3	Maret	603	603
4	April		
5	Mei		
6	Juni		
7	Juli		
8	Agustus		
9	September		
10	Oktober		
11	November		
12	Desember		
	Jumlah	1.437	1.437

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.15 tidak terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

d. Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Penerimaan Kas adalah penerimaan yang diterima dalam masa waktu berjalan pada satu periode tertentu, penerimaan kas dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lainnya yang sah yang telah divalidasi oleh Pemegang Kas Umum Daerah (Sumber: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024). Sedangkan pengeluaran kas adalah pengeluaran guna membiayai belanja daerah berdasarkan DPA/DPPA-PD dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024).

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka RKUD pada bank umum yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah menunjuk Bank Jateng selaku Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). (Sumber: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024).

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dilakukan antara BUD yang memberi kuasa kepada Kuasa BUD dengan Bank Umum (Bank Jateng).

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah bertujuan sebagai proses pengendalian keuangan yang penting guna membantu memastikan saldo yang akurat dan keandalan laporan keuangan. Rumus Perhitungan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah: Jumlah Berita Acara (BA) Rekonsiliasi yang Disahkan dibagi dengan jumlah Berita Acara (BA) Rekonsiliasi per Bulan yang dibuat dikali 100%

Data jumlah penerimaan dan pengeluaran ini diambil dari BKU dan rekening koran yang telah dicatat oleh Kuasa BUD dan Bank Jateng. Pada akhir periode pelaporan, dilakukan rekonsiliasi data

antara Kuasa BUD dan Bank Jateng. Sehingga menghasilkan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Kas.

Berikut data Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2024:

Tabel 2. 16

Cakupan Rekonsiliasi *Data* Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BA Rekon yang Dibuat	na	na	na	na	na	3
Jumlah BA yang Disahkan	na	na	na	na	na	3
Total	na	na	na	na	na	100%

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2024

Pada tabel diatas, pada triwulan I terdapat 3 Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dan Bank Jateng. Sehingga, antara jumlah BA Rekonsiliasi yang dibuat dan jumlah BA Rekonsiliasi yang disahkan mencapai persentase 100%. Berikut rincian jumlah BA yang dibuat pada Triwulan I Tahun 2024:

Tabel 2. 17

Rincian jumlah BA yang dibuat pada Triwulan I Tahun 2024

No	BULAN	Jumlah BA Rekon yang Dibuat	Jumlah BA yang Disahkan	Persentase (%)
1	Januari	1	1	100%
2	Februari	1	1	100%
3	Maret	1	1	100%
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			
	Total	3	3	100%

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2024

e. **Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu**

Laporan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib

menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 *unaudited* telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2024, sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyampaikan LKPD Tahun 2023 secara tepat waktu.

Adapun Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab Temanggung yang dikirim Tepat Waktu	Na	1	1	1	1	1
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Na	1	1	1	1	1
Persentase	Na	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : BPKPAD, 2024

Tabel 2. 19

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penyampaian LKPD <i>unaudited</i>	na	LKPD TA 2019 Tepat Waktu (31 Maret 2020)	LKPD TA 2020 Tepat Waktu (31 Maret 2021)	LKPD TA 2021 Tepat Waktu (30 Maret 2022)	LKPD TA 22 Tepat Waktu (17 Maret 2023)	LKPD TA 2023 Tepat Waktu (15 Maret 2024)

Berdasarkan tabel di atas, penyampaian LKPD Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2020 sampai 2024) telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu karena disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Untuk LKPD Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada 15 Maret 2024. Adapun LKPD 2024 akan disampaikan pada tahun 2025.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

f. Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu

Barang Milik Daerah (BMD) dicatat dan dilaporkan sesuai asas-asas pengelolaan BMD, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMD tercermin dari pelaporan BMD secara periodik dan tepat waktu yang dimulai dari pencatatan dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mendagri nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan dan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Adapun Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah satuan kerja yang tertib	136	137	142	103	103	103
Jumlah satuan kerja	168	168	168	103	103	103
Persentase (%)	80,95	81,55	84,52	100	100	100

Sumber Data: BPKPAD, 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk Tahun 2024 Triwulan I (Januari–Maret), 103 satuan kerja sudah tepat waktu dalam menyampaikan laporan Barang Milik Daerah, hal ini dikarenakan laporan Barang Milik Daerah dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang batas akhir penyampaian ke BPK RI tanggal 31 Maret 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung disampaikan ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2024. Berikut ini daftar SKPD yang menyampaikan laporan daftar barang milik daerah tepat waktu:

Tabel 2. 21
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel TA 2024 triwulan I

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	V	V	V			
2	Dinas Kesehatan	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V	V	V			
4	UPT Puskesmas Temanggung	V	V	V			
5	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	V	V			
6	UPT Puskesmas Tembarak	V	V	V			
7	UPT Puskesmas Selopampang	V	V	V			
8	UPT Puskesmas Pringsurat	V	V	V			
9	UPT Puskesmas Kranggan	V	V	V			
10	UPT Puskesmas Pare	V	V	V			
11	UPT Puskesmas Parakan	V	V	V			
12	UPT Puskesmas Traji	V	V	V			
13	UPT Puskesmas Bulu	V	V	V			
14	UPT Puskesmas Ngadirejo	V	V	V			
15	UPT Puskesmas Kaloran	V	V	V			
16	UPT Puskesmas Tepusen	V	V	V			
17	UPT Puskesmas Candiroto	V	V	V			
18	UPT Puskesmas Bejen	V	V	V			
19	UPT Puskesmas Bansari	V	V	V			
20	UPT Puskesmas Wonobojo	V	V	V			
21	UPT Puskesmas Tretep	V	V	V			
22	UPT Puskesmas Kedu	V	V	V			
23	UPT Puskesmas Kledung	V	V	V			
24	UPT Puskesmas Kandangan	V	V	V			
25	UPT Puskesmas Jumo	V	V	V			
26	UPT PuskesmasGemawang	V	V	V			
27	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	V	V			
28	UPT Puskesmas Rejosari	V	V	V			
29	UPT Puskesmas Banjarsari	V	V	V			
30	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	V	V	V			
31	Dinas Sosial	V	V	V			
32	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V	V	V			
33	DPPPAPP dan KB	V	V	V			
34	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V	V	V			
35	DPRKPLH	V	V	V			
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	V			
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	V	V			
38	Dinas Perhubungan	V	V	V			
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	V			
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
41	Dinas Penanaman Modal	V	V	V			
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	V	V			
43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	V	V			
44	Inspektorat	V	V	V			
45	BAPPEDA	V	V	V			
46	BPKPAD	V	V	V			
47	BKPSDM	V	V	V			
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	V			
49	Bagian Umum	V	V	V			
50	Bagian Prokopim	V	V	V			
51	Bagian Hukum	V	V	V			
52	Bagian Kesra	V	V	V			
53	Bagian Perekonomian	V	V	V			
54	Bagian Pembangunan	V	V	V			
55	Bagian Pemerintahan	V	V	V			
56	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	V	V	V			
57	Bagian Organisasi	V	V	V			
58	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	V	V			
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	V			
60	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran	V	V	V			
61	Kecamatan Temanggung	V	V	V			
62	Kelurahan Temanggung I	V	V	V			
63	Kelurahan Temanggung II	V	V	V			
64	Kelurahan Butuh	V	V	V			
65	Kelurahan Jampireso	V	V	V			
66	Kelurahan Jampirejo	V	V	V			
67	Kelurahan Kertosari	V	V	V			
68	Kelurahan Banyuurip	V	V	V			
69	Kelurahan Kowangan	V	V	V			
70	Kelurahan Jurang	V	V	V			
71	Kelurahan Madureso	V	V	V			
72	Kelurahan Sidorejo	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
73	Kelurahan Tlogorejo	V	V	V			
74	Kelurahan Kebonsari	V	V	V			
75	Kelurahan Manding	V	V	V			
76	Kelurahan Mungseng	V	V	V			
77	Kelurahan Purworejo	V	V	V			
78	Kelurahan Giyanti	V	V	V			
79	Kelurahan Walitelon Sel	V	V	V			
80	Kelurahan Walitelon Utara	V	V	V			
81	Kecamatan Tembarak	V	V	V			
82	Kecamatan Pringsurat	V	V	V			
83	Kecamatan Kaloran	V	V	V			
84	Kecamatan Parakan	V	V	V			
85	Kelurahan Parakan Wetan	V	V	V			
86	Kel Parakan Kauman	V	V	V			
87	Kecamatan Bulu	V	V	V			
88	Kecamatan Kedu	V	V	V			
89	Kecamatan Kandangan	V	V	V			
90	Kecamatan Candiroto	V	V	V			
91	Kecamatan Ngadirejo	V	V	V			
92	Kelurahan Manggong	V	V	V			
93	Kecamatan Jumo	V	V	V			
94	Kecamatan Wonoboyo	V	V	V			
95	Kecamatan Kranggan	V	V	V			
96	Kelurahan Kranggan	V	V	V			
97	Kecamatan Bejen	V	V	V			
98	Kecamatan Kledung	V	V	V			
99	Kecamatan Bansari	V	V	V			
100	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	V			
101	Kecamatan Selopampang	V	V	V			
102	Kecamatan Gemawang	V	V	V			
103	Kecamatan Tretep	V	V	V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan BMD Tahun 2023

g. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 22
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	3.391	945	946	965	1.032	1.039
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	3.441	1.200	1.200	1.094	1.094	1.070
Persentase (%)	98,55	78,75	78,83	88,20	94,33	97,10

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2023

Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan sebesar 1.070 yang terdiri dari 1.060 bidang tanah dan 10 unit bangunan gedung. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2023 dikarenakan beberapa aset berupa tanah yang tadinya 2 bidang atau lebih karena disewa 1 orang maka tercatat 1 perjanjian sewa, dan karena alih fungsi salah satu contoh digunakan untuk makam. Masih terdapat beberapa aset tanah yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan tarif berdasarkan nilai *appraisal* terlalu tinggi, sehingga atas aset tanah yang lama tidak termanfaatkan perlu pemeliharaan dan perawatan. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Temanggung akan meningkatkan sosialisasi terkait pemanfaatan tanah beserta tarifnya kepada masyarakat.

Dibandingkan Tahun 2023 pada Tahun 2024 terdapat kenaikan pemanfaatan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jumlah pemanfaatan tahun 2024 sebesar 97,10%.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23
Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2024

Uraian	2024		
	Jumlah potensi aset	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang tidak Dimanfaatkan
Tanah	1.060	1.029	31
Bangunan	10	10	0
Jumlah	1.070	1.039	31

Sumber : BPKPAD, 2023

Program Pendapatan Daerah

h. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penetapan target merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Target pajak daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pajak daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud peningkatan potensi target pajak daerah adalah selisih jumlah target pajak daerah tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan rumus **persentase peningkatan potensi target pajak daerah** adalah target pajak daerah tahun berkenaan dikurangi jumlah target pajak daerah tahun sebelumnya dibagi jumlah target pajak daerah tahun sebelumnya dikali 100%. Realisasi persentase peningkatan target pajak daerah Tahun 2024 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24
Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Target Pajak Daerah	41.455.000.000	36.723.000.000	45.834.000.000	69.760.000.000	74.947.290.400	76.510.647.700
Peningkatan Target Pajak Daerah	2.439.475.168	-4.732.000.000	9.111.000.000	23.926.000.000	5.187.290.400	1.563.357.300
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	6,25%	-11,414%	24,81%	52%	7,44%	2,09%

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Tahun 2023

Adapun data jumlah objek pajak Tahun 2023 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 25
Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2023-2024 Triwulan I

Uraian	2023	2024	Jumlah Peningkatan
Target Pajak Daerah	74.947.290.400	76.510.647.700	1.563.357.300

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Faktor pendorong meningkatnya persentase peningkatan target pajak daerah salah satunya yaitu pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara *online* melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB. Selain itu, pemutakhiran data objek pajak daerah yang akan menghasilkan data yang lebih *valid* dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri juga akan meningkatkan target pajak daerah.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih adanya data objek pajak yang belum termutakhirkan dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru.

i. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat *official assessment* maka BPKPAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPKPAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- d. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; dan
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011).

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai dimasukkan dalam **aplikasi SIAP PAKDE** secara *online*, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPM, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketetapan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam

system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 26
Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	1.728	1.197	2.346	1.886	1.802	345
2	Jumlah permohonan/pengajuan SKPD	1.728	1.197	2.346	1.886	1.802	345
3.	Persentase(%)	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan (SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Salah satu faktor pendorong tercapainya target kinerja pada indikator ini adalah tersedianya sistem **aplikasi SIAP PAKDE** sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame dan air tanah dan meningkatnya kesadaran WP badan (*vendor*) reklame.

Namun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu antara lain masih ditemukan perbedaan antara izin reklame yang diterbitkan oleh DPM dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan dengan melakukan koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.

Tabel 1.28
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2024 Triwulan I

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
1.	Air Tanah	58	60	61										179
2.	Reklame	41	42	83										166

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
	Jumlah	127	99	102	144									345

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

j. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak daerah berasal dari penerimaan 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, PBB-P2 dan BPHTB. Realisasi penerimaan pajak daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase realisasi pajak daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pajak daerah dikali 100%. Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27

Persentase Realisasi terhadap target Pajak Daerah tahun 2019-2024 triwulan I (per 31 Mater 2024)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	74.191.559.232	79.677.967.921	11.012.235.301
Target Pajak Daerah	41.455.000.000	36.723.000.000	45.834.000.000	69.760.000.000	74.947.290.400	76.510.647.700
Persentase Realisasi Pajak Daerah	128,87	130,40	115,27	106,35	106,31	14,39

Sumber: LRA 2023 Kab. Temanggung (per 5 Januari 2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 pada triwulan I ini mencapai 14,39%. Realisasi dapat dikatakan belum maksimal, hal ini terjadi karena penyetoran pajak yang masuk sampai dengan 31 Maret 2024 hanya dari pembayaran pajak rutin baik *official* maupun *self assessment* seperti pajak Hotel, pajak Resto, pajak Penerangan Jalan Umum, pajak Parkir dan pajak Air Tanah. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan faktor penghambat adalah trend triwulan I yang merupakan waktu dengan *load* transaksi terendah dibandingkan triwulan sebelumnya dan triwulan I belum sepenuhnya menggambarkan keadaan realisasi pajak daerah . Upaya yang terus

dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi penagihan pajak daerah sehingga realisasi melampaui target.

Tabel 2. 28
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 (Data Per 31 Maret 2024)

Pajak	Target	Realisasi			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1. Hotel	230.000.000	94.056.159			
2. Restoran	2.870.817.200	533.180.476			
3. Hiburan	100.279.100	21.330.136			
4. Reklame	813.975.100	120.138.745			
5. PJU	23.000.000.000	6.012.142.361			
6. Parkir	145.000.000	45.217.050			
7. Air Tanah	350.576.300	94.651.055			
8. PBB-P2	26.000.000.000	1.409.319.046			
9. BPHTB	23.000.000.000	2.682.200.273			
Jumlah	76.510.647.700	11.012.235.301			

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2024

k. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 3 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2024) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPKPAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi Pajak Daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	14	14	13	11	18	34
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	14	14	13	11	18	34
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKPAD , 2023

Tahun 2024 jumlah OPD pengelola pendapatan sebanyak 35 OPD, dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 18 jumlahnya meningkat 17 OPD yaitu dari Kelurahan-Kelurahan yang memiliki anggaran pendapatan 2024. Pendapatan yang masuk dalam anggaran pendapatan kelurahan 2024 adalah Penyewaan Tanah dan Retribusi Pemakaian Ruangan.

Tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung suksesnya indikator ini.

Sedangkan faktor penghambat yang mungkin terjadi karena pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringnya terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu sehingga terus dilakukan upaya mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung. 34 OPD pengelola pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 30
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2024

NO	NAMA OPD	2024	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-
4	Dinas Perhubungan	√	-
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√	-
6	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	√	-
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	√	-
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	√	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	-
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	-
11	Bagian Umum	√	-
12	Kecamatan Temanggung	√	-
13	Kecamatan Kaloran	√	-
14	Kecamatan Pringsurat	√	-
15	Kecamatan Parakan	√	-
16	Kelurahan Banyuurip	√	-
17	Kelurahan Butuh	√	-
18	Kelurahan Giyanti	√	-
19	Kelurahan Jampirejo	√	-
20	Kelurahan Jampiroso	√	-
21	Kelurahan Jurang	√	-
22	Kelurahan Kebonsari	√	-
23	Kelurahan Kertosari	√	-
24	Kelurahan Kowangan	√	-
25	Kelurahan Kranggan	√	-
26	Kelurahan Madureso	√	-
27	Kelurahan Manding	√	-
28	Kelurahan Mungseng	√	-
29	Kelurahan Parakan Kauman	√	-
30	Kelurahan Parakan Wetan	√	-
31	Kelurahan Purworejo	√	-
32	Kelurahan Sidorejo	√	-
33	Kelurahan Temanggung II	√	-
34	Kelurahan Tlogorejo	√	-

Sumber : BPPKAD Kab.Temanggung

Data Tambahan :

Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan

luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah. Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- c. Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- d. Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus: jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 31
Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat Tahun 2019-2024 Triwulan I

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	1355	1366	1455	1799	2194	2.302
Jumlah Tanah Pemda	2839	2861	2865	2872	2919	2.919
Persentase (%)	47,27	47,74	50,78	62,63	73,31	78,86

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2023

Adapun jumlah pensertifikatan tanah pemda di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.34
Pensertifikatan Tanah Pemda Tahun 2024 Triwulan I

Uraian	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	Jml
Jumlah Sertifikat tanah yang terbit	120	72	38										230

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2023

Pada tahun 2024 triwulan I telah terbit 230 sertifikat, atas 230 sertifikat tersebut menambah 108 bidang tanah Pemda yang tadinya belum bersertifikat dan hal ini mengalami peningkatan jumlah tanah yang bersertifikat menjadi sebanyak 2.302 bidang, sehingga dibanding tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,49%.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat

indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari 14 Indikator kinerja program, terdapat 2 Indikator yang belum mencapai target 100% Antara lain :
 - a. Indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berstatus upaya keras dengan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2024 sebesar 14,39% terhadap target Renstra sebesar 95% sehingga capaiannya 15,15%. Hal ini disebabkan karena pada triwulan pertama, penerimaan Pajak Daerah belum sepenuhnya diterima sehingga menyebabkan persentasenya kecil. Persentase indikator ini akan meningkat sejalan dengan berjalannya waktu dan akan tercapai pada triwulan IV tahun bersangkutan.
 - b. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah dengan realisasi kinerja 2,09% dari target 8% dan capainnya sebesar 26,07%. Realisasi masih rendah dikarenakan Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain :
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam pengelolaan pajak daerah
 - b. Pencatatan dan penatausahaan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak secara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
 - c. Kurangnya kualitas Pengelolaan BMD
 - d. Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 (SISMIOP)
 - e. Petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak sehingga kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.32 berikut:

Tabel 2. 32
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/S atuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Keuangan				437.021.274.075
A	Program pengelolaan Keuangan daerah		persentase dokumen penganggaran tepat waktu, Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100%	1.620.428.000
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	93%	
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	
			Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%	
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%	
			Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Dokumen Rencana Anggaran yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	534.988.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	HASIL PENETAPAN		
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Sa tuan	Kebutuhan Dana
	Keuangan				437.021.274.075
A	Program pengelolaan Keuangan daerah		persentase dokumen penganggaran tepat waktu, Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD		1.620.428.000
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	93%	
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	
			Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%	
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%	
			Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Dokumen Rencana Anggaran yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	534.988.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPd 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	194.261.200
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	245.726.800
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah dokumen hasil tata kelola Kas Daerah	100%	389.964.000
5	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	389.964.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	695.476.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	HASIL PENETAPAN			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Kebutuhan Dana
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	194.261.200
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	245.726.800
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah dokumen hasil tata kelola Kas Daerah	100%	389.964.000
5	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	389.964.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	695.476.000

No	RANCANGAN AWAL RKP 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/S atuan	Pagu Indikatif (Rp.)
6	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	16 Dokumen	235.000.000
7	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	460.476.000
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	1.390.608.125
			penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.390.608.125

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	HASIL PENETAPAN			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Sa tuan	Kebutuhan Dana
6	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	16 Dokumen	235.000.000
7	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	460.476.000
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	1.390.608.125
			penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.390.608.125

No	RANCANGAN AWAL RKPd 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
8	Penyusunan Standar Harga	kab. Temanggung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	25.500.000
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Laporan	1.255.108.125
10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	110.000.000
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		persentase realisasi penerimaan pajak daerah, persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu, persentase Peningkatan Potensi Target pajak daerah	10% 100% 95% 100%	619.828.400
			Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9%	
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	
			Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	95,5%	
			Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	HASIL PENETAPAN		
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Kebutuhan Dana
8	Penyusunan Standar Harga	kab. Temanggung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	25.500.000
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Laporan	1.255.108.125
10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	110.000.000
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		persentase realisasi penerimaan pajak daerah, persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu, persentase Peningkatan Potensi Target pajak daerah	10% 100% 95% 100%	619.828.400
			Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9%	
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	
			Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	95,5%	
			Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	

No	RANCANGAN AWAL RKP 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase pendataan dan pendaftaran objek pajak beserta pelayanan surat ketetapan dan pemutakhiran data pajak daerah tepat waktu	100%	619.828.400
11	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	172.783.600
12	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	282.783.600
13	Penagihan Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	90.000.000
14	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	74.261.200
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.749.143.186
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22.380.299.986

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	HASIL PENETAPAN		
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Kebutuhan Dana
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase pendataan dan pendaftaran objek pajak beserta pelayanan surat ketetapan dan pemutakhiran data pajak daerah tepat waktu	100%	619.828.400
11	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	172.783.600
12	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	282.783.600
13	Penagihan Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	90.000.000
14	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	74.261.200
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.749.143.186
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22.380.299.986

No	RANCANGAN AWAL RKP 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1089 Orang/bulan	22.380.299.986
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas, dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor	100%	185.500.000
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	73.500.000
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terbayarnya listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	980.843.200
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	HASIL PENETAPAN		
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Kebutuhan Dana
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1089 Orang/bulan	22.380.299.986
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas, dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor	100%	185.500.000
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	73.500.000
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terbayarnya listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	980.843.200
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-

No	RANCANGAN AWAL RKPd 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	230.000.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	750.843.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana, gedung kantor, serta pendukung gedung kantor		202.500.000
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	80.000.000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	25.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47.500.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	HASIL PENETAPAN		
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Kebutuhan Dana
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	230.000.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	750.843.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana, gedung kantor, serta pendukung gedung kantor		202.500.000
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	80.000.000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	25.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47.500.000

No	RANCANGAN AWAL RKP 2025				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
Total sebelum ditambah Penunjang Urusan Keuda					27.380.007.711
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersalurkannya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak	100%	409.641.266.364
28	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	392.152.666.000
29	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.500.000.000
30	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	14.988.600.364
Total Setelah ditambah Penunjang Urusan Keuda					437.021.274.075

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	HASIL PENETAPAN		
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja/Satuan	Kebutuhan Dana
Total sebelum ditambah Penunjang Urusan Keuda					27.380.007.711
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersalurkannya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak	100%	409.641.266.364
28	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	392.152.666.000
29	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.500.000.000
30	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	14.988.600.364
Total Setelah ditambah Penunjang Urusan Keuda					437.021.274.075

2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 33
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
N i h i l					

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 beberapa Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 34
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

no	NAMA INOVASI	PIHAK YANG TERLIBAT	URAIAN INOVASI	TAHUN PEMBUATAN	RUANG LINGKUP
1	Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (SIAP PAKDE)	BPKPAD, Bank Jateng, Wajib Pajak Daerah meliputi WP Restoran, Air Tanah, Parkir, Hiburan, dan Reklame	Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pajak daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pajak daerah yang mudah, pasti, tertib, dan transparan, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak daerah dari mana saja dan kapan saja	2021	Inovasi Pengelolaan Pendapatan
2	E-PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH	RSUD, PUSKESMAS dan Perangkat	Sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan BLUD yang	2022	Inovasi Penatausahaan Pendapatan

no	NAMA INOVASI	PIHAK YANG TERLIBAT	URAIAN INOVASI	TAHUN PEMBUATAN	RUANG LINGKUP
		Daerah Pengelola Pendapatan	terpusat dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan suatu format laporan yang seragam yang secara otomatis mampu dihasilkan dari aplikasi berdasarkan data pendapatan yang dimasukkan. aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIAPPAKDE yang sudah ada sebelumnya terkait pengelolaan pajak dan retribusi yang secara otomatis terbentuk laporan penatausahaannya.		
3	E-PERSEDIAAN	SEMUA OPD	Sistem informasi akuntansi persediaan, yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi persediaan yang sudah menggunakan metode FIFO dan FEFO yang bertujuan agar penatausahaan persediaan akuntabel, mudah diakses dimanapun dan kapanpun	2022	Inovasi Pelayanan Pemerintah

2.8. Penghargaan

Dari tahun 2012 – 2024. Kabupaten Temanggung mendapat penghargaan WTP 12 tahun berturut dari BPK. Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 35
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 8	BPK	Nasional	BPKPAD
2	OPINI WTP yang ke 9	BPK	Nasional	BPKPAD
3	OPINI WTP yang ke 10	BPK	Nasional	BPKPAD
5	OPINI WTP 10 tahun berturut -turut	BPK	Nasional	BPKPAD
6	OPINI WTP yang ke 11	BPK	Nasional	BPKPAD
7	OPINI WTP yang ke 12	BPK	Nasional	BPKPAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra 2024-2026 adalah **“Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.”** dengan sasaran yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan :

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	
						2025	Target kondisi 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	%	15,75	15,75
				Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP
			Program Pengelolaan Keuangan	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	93	93
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100	100
				penyampaian LKPD yang tepat waktu	%	100	100
				penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80	80

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	Target kondisi
						2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	9	9
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	95,5	95,5
				Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024- 2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2026.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung tahun 2025

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2025			RKPD BPKPAD TAHUN 2025			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	keuangan	437,021,274,075		keuangan	437,021,274,075	-
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	1,620,428,000	1	Program pengelolaan Keuangan daerah	1,620,428,000	-
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	534,988,000	a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	534,988,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	55,000,000		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	55,000,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40,000,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	194,261,200		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	194,261,200	-
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	245,726,800		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	245,726,800	-
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	389,964,000	b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	389,964,000	-
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	389,964,000		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	389,964,000	-
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	695,476,000	c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	695,476,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235,000,000	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2025		
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	460,476,000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,390,608,125
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,390,608,125
	Penyusunan Standar Harga	25,500,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,255,108,125
	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	110,000,000
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	619,828,400
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	619,828,400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	172,783,600
	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	282,783,600
	Penagihan Pajak Daerah	90,000,000
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	74,261,200

RKPD BPKPAD TAHUN 2025			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	460,476,000	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,390,608,125	-
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,390,608,125	-
	Penyusunan Standar Harga	25,500,000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,255,108,125	-
	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	110,000,000	-
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	619,828,400	-
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	619,828,400	-
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	172,783,600	-
	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	282,783,600	-
	Penagihan Pajak Daerah	90,000,000	-
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	74,261,200	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2025		
No	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,749,143,186
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,380,299,986
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,380,299,986
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185,500,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,000,000
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980,843,200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750,843,200

RKPD BPKPAD TAHUN 2025			(+/-)
No	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,749,143,186	-
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,380,299,986	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,380,299,986	-
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185,500,000	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,000,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73,500,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,000,000	-
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980,843,200	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,000,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750,843,200	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2025		
No	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	202,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,500,000
Total sebelum ditambah Penunjang Usuran Keuda		27,380,007,711
	Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	409,641,266,364
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	392,152,666,000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,500,000,000

RKPD BPKPAD TAHUN 2025			(+/-)
No	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	202,500,000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,500,000	-
Total sebelum ditambah Penunjang Usuran Keuda		27,380,007,711	-
	Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	409,641,266,364	-
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	392,152,666,000	-
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,500,000,000	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2025		
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14,988,600,364
Total Setelah ditambah Penunjang Urusan Keuda		437,021,274,075

RKPD BPKPAD TAHUN 2025			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14,988,600,364	-
Total Setelah ditambah Penunjang Urusan Keuda		437,021,274,075	-

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan pagu antara rancangan renja dan RKPD Tahun 2025.

Tabel 4. 2

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	keuangan								437.021.274.075					151.333.555.111
5.02.02	Program pengelolaan Keuangan daerah	persentase dokumen penganggaran tepat waktu, Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD		100%	Kab temanggung				1.620.428.000			persentase dokumen penganggaran tepat waktu, Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100%	1.895.500.000
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	93%								Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	93%	
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%								Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	
			Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%								Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%	
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%								Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%	
			Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%								Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Kab temanggung		Dokumen Rencana Anggaran yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	534.988.000			Dokumen Rencana Anggaran yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	616.500.000	
5.02.02.201.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	kab. Temanggung	Program pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.000.000	DAU	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60.500.000	
5.02.02.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	44.000.000	
5.02.02.201.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	kab. Temanggung		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	194.261.200	DAU	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	242.000.000	
5.02.02.201.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	245.726.800	DAU	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	270.000.000		
5.02.02.2-02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					Jumlah dokumen hasil tata kelola Kas Daerah	100%	389.964.000			Jumlah dokumen hasil tata kelola Kas Daerah	100%	514.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2-02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	kab. Temanggung	Program pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	389.964.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	514.000.000
5.02.02.2-03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	695.476.000			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	765.000.000
5.02.02.2-03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	16 Dokumen	kab. Temanggung	Program pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	16 Dokumen	235.000.000	DAU		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	16 Dokumen	258.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2-03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	460.476.000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	506.500.000
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu							1.390.608.125			persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu		1.548.000.000
		penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%								penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja		80%								Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80%	
5.02.03.2-03	Pengelolaan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.390.608.125			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.548.000.000
5.02.03.2-03.01	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	kab. Temanggung	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	25.500.000	DAU		Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	28.000.000
5.02.03.2-03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Laporan	1.255.108.125	DAU		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Laporan	1.400.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2-03.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	110.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	120.000.000
5.02.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pajak daerah, persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, persentase Peningkatan Potensi Target pajak daerah		100% 100% 95% 100%					754.828.400			persentase realisasi penerimaan pajak daerah, persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, persentase Peningkatan Potensi Target pajak daerah	100% 100% 95% 100%	879.000.000
		Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah		9%								Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	10%	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		100%								Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah		95,5%								Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	96%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu		100%								Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	
5.02.04.2-01.	Pengelolaan Pendapatan Daerah						Persentase pendataan dan pendaftaran objek pajak beserta pelayanan surat ketetapan dan pemutakhiran data pajak daerah tepat waktu	100%	754.828.400			Persentase pendataan dan pendaftaran objek pajak beserta pelayanan surat ketetapan dan pemutakhiran data pajak daerah tepat waktu	100%	879.000.000
5.02.04.2-01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	kab. Temanggung	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	172.783.600	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	275.000.000
5.02.04.2-01.06	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	282.783.600	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	395.000.000
5.02.04.2-01.11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	90.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	99.000.000
5.02.04.2-01.13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	209.261.200	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	110.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23.749.143.186			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	23.455.299.986
5.02.01.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22.380.299.986			Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22.380.299.986
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1089 Orang/bulan	kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1089 Orang/bulan	22.380.299.986	DAU, PAD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1089 Orang/bulan	22.380.299.986
5.02.01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas, dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor	100%	185.500.000			Persentase Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas, dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor	100%	203.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2-06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	kab. Temanggung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000
5.02.01.2-06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	kab. Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.500.000
5.02.01.2-06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	kab. Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.500.000
5.02.01.2-06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	73.500.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	80.000.000
5.02.01.2-06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	57.000.000
5.02.01.2-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Terbayarnya listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	980.843.200			Persentase Terbayarnya listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	650.000.000
5.02.01.2-08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	kab. Temanggung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2-08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	230.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250.000.000
5.02.01.2-08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	750.843.200	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	400.000.000
5.02.01.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana, gedung kantor, serta pendukung gedung kantor		202.500.000			Persentase terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana, gedung kantor, serta pendukung gedung kantor		222.000.000
5.02.01.2-09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	80.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	88.000.000
5.02.01.2-09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	kab. Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.000.000
5.02.01.2-09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	25.000.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	27.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2-09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47.500.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	52.000.000
Total sebelum ditambah Penunjang Urusan Keuda									27.515.007.711			0	0	27.777.799.986
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						Tersalurkannya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak	100%	409.641.266.364			Tersalurkannya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak	100%	123.555.755.125
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	kab. Temanggung	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	392.152.666.000	Bankeu Prov, dana Desa, DAU		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	22.555.755.125
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.500.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.000.000.000
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	14.988.600.364	PAD		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	-
Total Setelah ditambah Penunjang Urusan Keuda									437.021.274.074					151.333.555.111

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, Tantangan, peluang, Hambatan, dan kekuatan yang dimiliki maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar Rp 427.610.626.681,00 dari total anggaran Rp 430.352.555.222,00. Hal ini dikarenakan tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja transfer/bantuan keuangan terserap 99.86%. Belanja tak terduga dan belanja transfer tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena pengampu kegiatan dari beberapa OPD (DPUPR, DPRKPLH, Dinpermades, Dindikpora, Dishub, DKP3,

Dinpusip, Dinhub dan BPKPAD yaitu Dana Insentif Desa). Sedangkan peran BPKPAD hanya dari sisi anggaran dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah kelengkapan SPJ diverifikasi oleh OPD pengampu, maka anggarannya bukan menjadi pendukung indikator sasaran.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka capaian anggaran untuk Program dan kegiatan dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri terdiri dari Realisasi belanja program sebanyak Rp.20.449.972.246,00 terhadap anggaran SKPD sebanyak Rp.21.828.966.415,00 atau 93,68% dalam 1 (satu) tahun dikarenakan efisiensi anggaran. sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 8.709.395.087,00 atau 32,61% dari anggaran, realisasi Belanja Modal sebesar 0%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.0,00 , Belanja Transfer sebesar Rp.185.380.541.955,00 atau 46,49% dari anggaran.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah terdiri dari 4 Program antara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Rp. 437.156.274.075,00 yang terdiri dari :

- Belanja Program Kegiatan sebesar Rp. 27.515.007.711,00 yang terdiri dari Program pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan keuangan, Dana Darurat dan mendesak, dan Dana Bagi Hasil) sebesar Rp. 409.641.266.364,00.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini. maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan

pentahapan yang telah direncanakan. atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2024
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I

NIP 197310201999031000

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD	√		√			
2.	Rencana Kerja Tim	√		√			
3.	Data dan Informasi	√		√			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	√		√			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	√		√			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	√		√			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	√		√			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	-		-			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	√		√			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	√		√			
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	-		-			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	-		-			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	√		√			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SEKepala Daerah	√		√			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√		√			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√		√			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√		√			

*) coret yang tidak perlu

**) khusus untuk provinsi

Temanggung, Juli 2024

Mengetahui
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, S.E., M.M.
NIP. 197310201999031005

Temanggung, Juli 2024

Disusun
PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN



RAHMA ASITTA Z., A.Md.Ak.
NIP. 200006012022012002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702

e-mail : bpkpad@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 800/ TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan BPKPAD Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. menyusun rancangan awal Renja, rancangan Renja, dan rancangan akhir Renja; dan
- b. menyelenggarakan Forum Internal Perangkat Daerah:
 1. menyusun jadwal kegiatan Forum Internal Perangkat Daerah;
 2. menyiapkan bahan Forum Internal Perangkat Daerah;
 3. menyiapkan paparan Sekretaris Perangkat Daerah;
 4. mendistribusikan undangan kepada *stakeholder* terkait dilampiri bahan Rancangan Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah; dan

5. menyiapkan sarana dan perlengkapan Forum Internal Perangkat Daerah antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Forum Internal Perangkat Daerah, tempat/ruang rapat, dokumentasi, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Juli 2024

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



TRI WINARNO, SE MM

Pembina Tk, I

NIP. 19731020 199903 1 005

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Anggota Tim yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 800/ Tahun 2024
TANGGAL : Juli 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN RENCANA
KERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HUSEIN TSANI UBADILLAH, S.E., M.Si.	SEKRETARIS	KETUA
2.	DRA.DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
3.	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	KABID PENGANGGARAN	ANGGOTA
4.	YUSI SUSANTI, SIP MM	KABID PERBENDAHARAAN	ANGGOTA
5.	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, S.E., M.M.	KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ANGGOTA
6.	KARTIKA SARI S.T, M.Eng	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	ANGGOTA
7.	YUSUF BANGUN C., S.E.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	ANGGOTA
8.	RAHMA ASITTA ZATIN	PENGELOLA PROGRAM	ANGGOTA
9.	ELI SETIYARINI	STAF PENDUKUNG	ANGGOTA

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



TRI WINARNO, SE MM
Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005